



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa penduduk merupakan subjek dan objek utama pembangunan pembangunan sehingga berbagai aspek pembangunan harus diintegrasikan demi terwujudnya penduduk yang berkualitas, produktif, dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, penataan persebaran penduduk, pembangunan keluarga, dan pengelolaan data kependudukan perlu adanya intervensi kebijakan kependudukan yang sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan sosial masyarakat Kota Salatiga;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan untuk melaksanakan program kependudukan secara terarah dan terpadu untuk jangka waktu lima tahunan, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga yang selanjutnya disebut GDPK adalah arah kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan Kota Salatiga tahun 2025-2045 yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan berwawasan kependudukan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga.
7. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat PJPk adalah dokumen yang berisi sasaran, indikator, dan target serta rencana aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Daerah yang akan menjadi referensi dalam penyusunan rencana kerja program/kegiatan/subkegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan menengah dan tahunan Daerah.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 2

- (1) PJPk merupakan pedoman teknis dan rencana aksi yang berisi indikator-indikator utama dalam perencanaan pembangunan kependudukan 5 (lima) tahunan.
- (2) PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan utama pelaksanaan PJPk menjadi arahan dan kebijakan strategis, serta Rencana Aksi dalam pencapaian tantangan dan sasaran pembangunan kependudukan dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Tujuan khusus pelaksanaan PJPK adalah untuk:
- penduduk tumbuh seimbang;
 - manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis;
 - keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 4

Strategi pelaksanaan PJPK dilakukan melalui:

- pengendalian kuantitas penduduk;
- peningkatan kualitas penduduk;
- pembangunan keluarga;
- penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- penataan administrasi kependudukan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika PJPK terdiri atas:

- Bab I berisi pendahuluan;
- Bab II berisi sasaran pembangunan kependudukan;
- Bab III berisi rencana aksi; dan
- Bab IV berisi penutup.

Pasal 6

PJPK dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- Pemantauan dan evaluasi PJPK dilaksanakan oleh Tim Koordinasi GDPK Daerah.
- Pemantauan dan evaluasi PJPK dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Unsur Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial;
 - lembaga/instansi pemerintah terkait; dan
 - unsur lembaga terkait.
- Tim Koordinasi bertugas melakukan mengordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja bidang pengendalian kuantitas;
 - b. kelompok kerja bidang peningkatan kualitas penduduk;
 - c. kelompok kerja bidang pembangunan keluarga;
 - d. kelompok kerja bidang penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
 - e. kelompok kerja bidang penataan data dan administrasi kependudukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 26 Mei 2026

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 26 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001



**LAPORAN AKHIR
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KOTA SALATIGA
TAHUN 2025-2029**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA SALATIGA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sasaran	4
1.4. Dasar Hukum	5
1.5. Batasan Pengertian.....	8
1.6. Analisis Situasi dan Capaian Pembangunan Kependudukan	14
1.6.1. Jumlah Penduduk dan Proyeksi Penduduk Lima Tahun Kedepan	14
1.6.2. Matriks Analisis Situasi Kependudukan Kota Salatiga	18
1.6.2.1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk.....	19
1.6.2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk	21
1.6.2.3. Pembangunan Keluarga	36
1.6.2.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	42
1.6.2.5. Integrasi Data Kependudukan.....	44
1.7. Isu Strategis.....	47
BAB II SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	50
2.1. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Pengelolaan Kuantitas Penduduk	50
2.2. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Peningkatan Kualitas Penduduk	51

2.3. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Strategi Pembangunan Keluarga	54
2.4. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	56
2.5. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan Administrasi Data Kependudukan	57
BAB III RENCANA AKSI.....	59
3.1. Tata Kelola Pembangunan Kependudukan.....	59
3.2. Rencana Aksi Tahun 2025 - 2029.....	61
3.2.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk	63
3.2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk	68
3.2.3. Pembangunan Keluarga.....	92
3.2.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk..	109
3.2.5. Integrasi Data Kependudukan	116
BAB IV PENUTUP	118
4.1. Monitoring	118
4.2. Evaluasi.....	118
4.3. Pelaporan.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin ...	15
Tabel 1.2 Proyeksi Penduduk Kota Salatiga	17
Tabel 1.3 Matriks analisis situasi kependudukan Pengelolaan Kuantitas Penduduk Kota Salatiga.....	19
Tabel 1.4 Matriks analisis situasi kependudukan Peningkatan Kualitas Penduduk Kota Salatiga.....	21
Tabel 1.5 Matriks analisis situasi kependudukan Pembangunan Keluarga Kota Salatiga	36
Tabel 1.6 Matriks analisis situasi kependudukan Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Penduduk Kota Salatiga	42
Tabel 1.7 Matriks analisis situasi kependudukan Integrasi Data Kependudukan Kota Salatiga	44
Tabel 2.1 Target Pengelolaan Kuantitas Penduduk Kota Salatiga Tahun 2025-2029	51
Tabel 2.2 Target Peningkatan Kualitas Penduduk Kota Salatiga Tahun 2025-2029	52
Tabel 2.3 Target Strategi Pembangunan Keluarga Kota Salatiga Tahun 2025-2029	55
Tabel 2. 4 Target Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kota Salatiga Tahun 2025-2029	56
Tabel 2.5 Target Penataan Administrasi Data Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2025-2029	57
Tabel 3.1 Tim Pengarah Penyusunan PJPk Kota Salatiga Tahun 2025-2029	59
Tabel 3.2 Kelompok Kerja Penyusunan Pjpk Kota Salatiga Tahun 2025-2029	60
Tabel 3.3 Rencana Aksi Pengendalian Kuantitas Penduduk	63
Tabel 3.4 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Penduduk.....	68
Tabel 3.5 Rencana Aksi Pembangunan Keluarga.....	92
Tabel 3.6 Rencana Aksi Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	109

Tabel 3.7 Rencana Aksi Integrasi Data Kependudukan	116
Tabel 4.1 Instrumen Monitoring dan Evaluasi	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kedudukan GDPK dan Peta Jalan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	6
Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020 - 2024	15
Gambar 1.3 Piramida Penduduk Kota Salatiga.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika kependudukan merupakan salah satu faktor fundamental yang menentukan arah dan keberhasilan pembangunan suatu negara. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset pendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja dan perluasan pasar domestik, namun juga dapat menjadi beban jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk menjadi prasyarat utama untuk mentransformasikan potensi demografi menjadi kesejahteraan sosial-ekonomi yang nyata.

Salah satu fenomena kependudukan paling krusial yang dihadapi Indonesia, termasuk Kota Salatiga, adalah bonus demografi. Periode ini berpotensi memberikan keuntungan ekonomi karena meningkatnya proporsi penduduk usia produktif, yang dapat memacu investasi dan pertumbuhan. Namun, keuntungan tersebut tidak datang secara otomatis. Keberhasilan pemanfaatan bonus demografi sangat bergantung pada kesiapan suatu wilayah dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang prima, serta kemampuan menciptakan lapangan kerja yang layak untuk menyerap angkatan kerja yang melimpah.

Menyadari urgensi pengelolaan kependudukan yang komprehensif, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan sebagai paradigma baru dalam perencanaan pembangunan nasional. Konsep ini menempatkan penduduk sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus pada tiga aspek fundamental: pemberdayaan, perlindungan, dan peningkatan kualitas hidup. Landasan hukum yang kuat untuk implementasi kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menjadi payung hukum bagi seluruh kebijakan kependudukan di tingkat nasional maupun daerah.

Sebagai implementasi dari amanat undang-undang tersebut, Pemerintah kemudian mengeluarkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014. GDPK berfungsi sebagai kerangka strategis yang mengintegrasikan lima pilar utama pembangunan kependudukan secara holistik: (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, (2) Peningkatan Kualitas Penduduk, (3) Pembangunan Keluarga, (4) Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, (5) Integrasi Data Kependudukan. Kelima pilar ini dirancang untuk saling bersinergi dalam menciptakan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan kerangka nasional tersebut, Kota Salatiga telah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai landasan kebijakannya. Saat ini, Kota Salatiga tengah berada dalam periode bonus demografi, dengan modal pembangunan manusia yang sangat kuat. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 85,72 dan Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 78,27 tahun pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum, penduduk Kota Salatiga memiliki akses yang baik terhadap pendidikan dan kesehatan.

Meskipun demikian, GDPK Kota Salatiga juga mengidentifikasi bahwa di balik capaian makro tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan spesifik yang memerlukan intervensi terfokus. Dari sisi kualitas sumber daya manusia, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tercatat 11,24 tahun menunjukkan adanya kebutuhan untuk mendorong partisipasi pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan daya saing angkatan kerja, di tengah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,86%. Dari sisi pengendalian kuantitas, laju pertumbuhan penduduk serta tingkat partisipasi keluarga berencana (KB) perlu terus dioptimalkan. Selain itu, isu persebaran penduduk yang belum merata antar wilayah juga menjadi catatan penting yang perlu ditangani.

Untuk menjembatani antara visi dan kebijakan yang tertuang dalam GDPK dengan aksi nyata di lapangan, diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang lebih operasional dan terukur. Oleh karena itu, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga 2025-2029 ini disusun. Dokumen

ini berfungsi sebagai rencana aksi lima tahunan yang menerjemahkan lima pilar GDPK ke dalam sasaran, strategi, program prioritas, target kinerja yang jelas, serta penanggung jawab yang konkret. Peta Jalan ini akan menjadi instrumen utama untuk mengorkestrasi seluruh sumber daya dan upaya lintas sektor, demi memastikan peluang bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk Kota Salatiga.

1.2. Tujuan

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen strategis yang memberikan arah pelaksanaan pembangunan kependudukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Peta jalan ini merupakan penjabaran lebih operasional dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), yang diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan tantangan spesifik yang dihadapi Kota Salatiga. Melalui peta jalan ini, diharapkan setiap kebijakan dan intervensi yang menyangkut isu-isu kependudukan dapat dilaksanakan secara sistematis oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berbasis data dan *evidence-based planning*. Adapun tujuan khusus dari Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- a. Mengarahkan pelaksanaan program pengendalian kuantitas penduduk agar pertumbuhan penduduk tetap dalam batas yang ideal dan seimbang, sesuai dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan Kota Salatiga.
- b. Meningkatkan kualitas penduduk dalam bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan daya saing, untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul yang adaptif terhadap perubahan global dan tantangan pembangunan daerah.
- c. Memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan sosial yang kokoh, melalui pendekatan holistik yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender.

- d. Mendorong persebaran penduduk yang lebih seimbang antarkecamatan di Kota Salatiga serta mengarahkan mobilitas penduduk secara produktif sesuai dengan potensi wilayah dan ketersediaan layanan dasar.
- e. Mewujudkan sistem informasi dan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi lintas sektor, guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti dan pemantauan pembangunan yang tepat sasaran.
- f. Membangun sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kependudukan, agar tercipta keselarasan antara kebijakan sektoral, kewilayahan, dan pemerintahan.

1.3. Sasaran

Adapun sasaran dari Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga adalah sebagai berikut.

- a. Tercapainya pengendalian jumlah penduduk melalui penurunan angka fertilitas secara proporsional, penguatan program Keluarga Berencana, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga.
- b. Meningkatnya kualitas penduduk yang tercermin dari perbaikan indikator pendidikan (terutama pendidikan tinggi), peningkatan status kesehatan, penurunan angka stunting dan kematian ibu dan bayi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- c. Terbangunnya keluarga-keluarga yang berkualitas dan berketahanan tinggi, dengan dukungan layanan pengasuhan, perlindungan anak, dan pemberdayaan keluarga lansia maupun keluarga dengan remaja.
- d. Terkelolanya persebaran dan mobilitas penduduk secara berimbang melalui kebijakan yang mendorong pembangunan kawasan secara merata dan integratif antarwilayah kecamatan.
- e. Tersedianya data kependudukan yang valid, terpercaya, dan saling terhubung antara perangkat daerah dan lembaga, yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making).
- f. Terintegrasinya pembangunan kependudukan dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya, seperti RPJMD, Renstra OPD, dan dokumen

sektoral lainnya, sebagai wujud pembangunan yang berbasis pada kondisi dan dinamika kependudukan lokal.

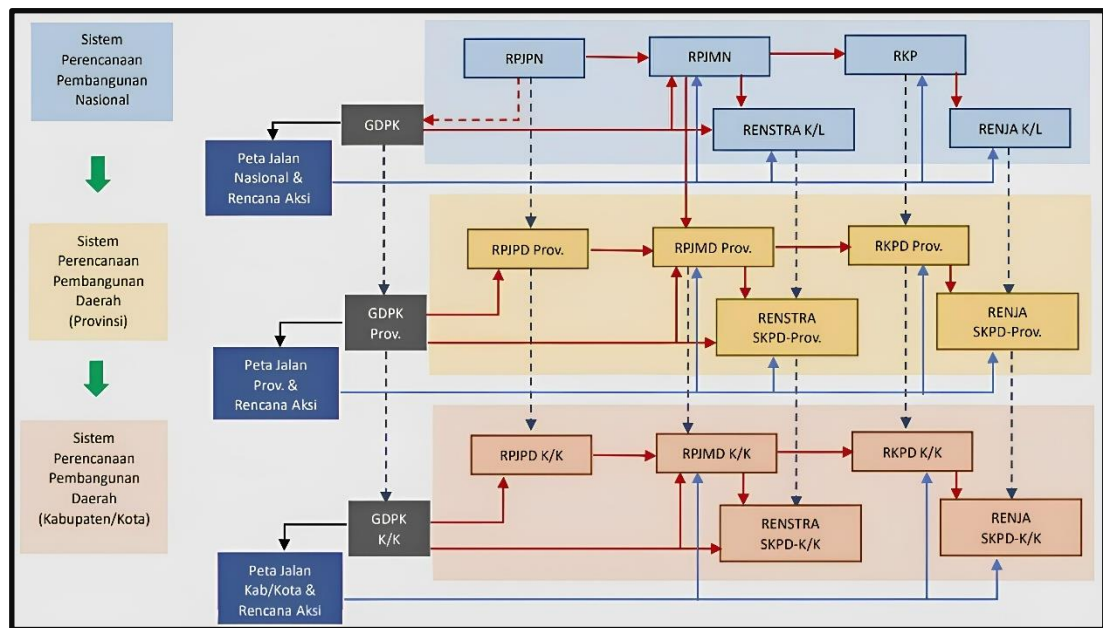
1.4. Dasar Hukum

Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2025–2029 berlandaskan pada berbagai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dasar hukum ini menjadi fondasi utama yang memberikan legitimasi serta arah normatif dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keberadaan dasar hukum ini penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, strategi, dan program yang dirancang dalam dokumen ini memiliki kejelasan arah, keabsahan hukum, dan keterpaduan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan peta jalan ini telah ditetapkan sebagai kerangka acuan strategis nasional dalam pembangunan kependudukan. GDPK diamanatkan dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta diintegrasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dokumen GDPK juga menjadi pijakan dalam penyusunan GDPK tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai upaya untuk menjamin keselarasan dan konsistensi antara pusat dan daerah.

Dalam konteks daerah, peta jalan ini menjadi instrumen penting untuk mengoperasionalkan GDPK secara lebih kontekstual sesuai dengan dinamika lokal Kota Salatiga. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan regulasi-regulasi turunan lainnya seperti Peraturan Presiden, Peraturan BKKBN, serta kebijakan strategis yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga. Selain itu, dokumen ini juga mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan daerah berbasis data, inklusivitas, keberlanjutan, dan kolaborasi antar sektor.

Dengan adanya dasar hukum yang kuat, peta jalan ini diharapkan mampu menjadi pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengarahkan pembangunan kependudukan di Kota Salatiga secara terencana, terstruktur, dan terukur. Dasar hukum ini juga menjadi pengikat koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga terkait, agar setiap program yang dijalankan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan kependudukan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Gambar 1.1 Kedudukan GDPK dan Peta Jalan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan kependudukan Kota Salatiga disusun berdasarkan kaidah-kaidah sebagai berikut.

- Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
- Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.
- Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
- Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

- e. Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.

Landasan hukum dari peta jalan ini diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- f. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan
- m. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

1.5. Batasan Pengertian

Untuk menjaga konsistensi pemahaman dan menghindari penafsiran yang beragam dalam penyusunan dan implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2025–2029, perlu disampaikan batasan pengertian terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam dokumen ini. Batasan ini berfungsi sebagai acuan bersama bagi para pemangku kepentingan yang terlibat, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi program pembangunan kependudukan. Beberapa istilah penting yang digunakan dalam dokumen ini antara lain sebagai berikut.

- 1. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
- 2. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas,

pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

3. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
10. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
11. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
12. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

13. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah dokumen operasionalisasi GDPK selama 5 tahun yang memuat analisis situasi kependudukan, kebijakan dan strategi, sasaran, indikator, target per tahun, dan rencana aksi untuk mencapai target pembangunan kependudukan.
16. Rencana Aksi adalah langkah-langkah dan kegiatan operasional yang rinci untuk mencapai tujuan tertentu termasuk sasaran, indikator, program, kegiatan dan penanggung jawab.
17. *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun)
18. *Age-Specific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 Tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 Wanita pada kelompok umur 15-19 tahun.
19. Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern adalah persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern.
20. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah rata-rata lamanya masa yang dilalui dalam menjalani pendidikan formal.
21. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi adalah perbandingan penduduk yang masih bersekolah pada jenjang Perguruan Tinggi (tanpa memandang usia), terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang sesuai dengan jenjang tersebut (19-23 tahun).
22. Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi kompetensi kerja (Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi) adalah jumlah Tenaga Kerja yang berhasil mendapatkan

sertifikasi kompetensi dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan sertifikat kompetensinya.

23. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita adalah bagian dari populasi anak balita pada waktu tertentu, yang bertubuh pendek dan sangat pendek ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
24. Jumlah Kasus Kematian Bayi adalah angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1.000 kelahiran hidup.
25. Jumlah Kasus Kematian Ibu adalah angka yang menggambarkan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama masa kehamilan, melahirkan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan untuk setiap 100.000 kelahiran hidup.
26. Tingkat Kemiskinan adalah bagian dari populasi penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri dan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.
27. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita adalah persentase perempuan usia kerja (≥ 15 tahun) yang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap total perempuan usia kerja.
28. Persentase Pekerja Informal adalah bagian dari total penduduk yang menjadi pekerja pada lapangan kerja informal.
29. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal adalah persentase penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal, yaitu sektor yang memiliki hubungan kerja resmi dengan perlindungan hukum seperti perjanjian kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan upah yang sesuai ketentuan perundang-undangan.

30. Gini Ratio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang dapat dibelanjakan (atau pengeluaran konsumsi) penduduk secara menyeluruh.
31. PDRB Per kapita adalah rata-rata nilai tambah ekonomi seluruh sektor yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).
32. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
33. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi) adalah Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi.
34. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) adalah ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga.
35. Indeks Perlindungan Anak adalah angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.
36. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%) adalah rumah tangga dianggap menempati rumah layak huni jika menempati rumah/bangunan tempat tinggal yang memenuhi keempat komponen rumah layak huni.
37. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) adalah akses sanitasi aman apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah (SPAL).
38. Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial

kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan.

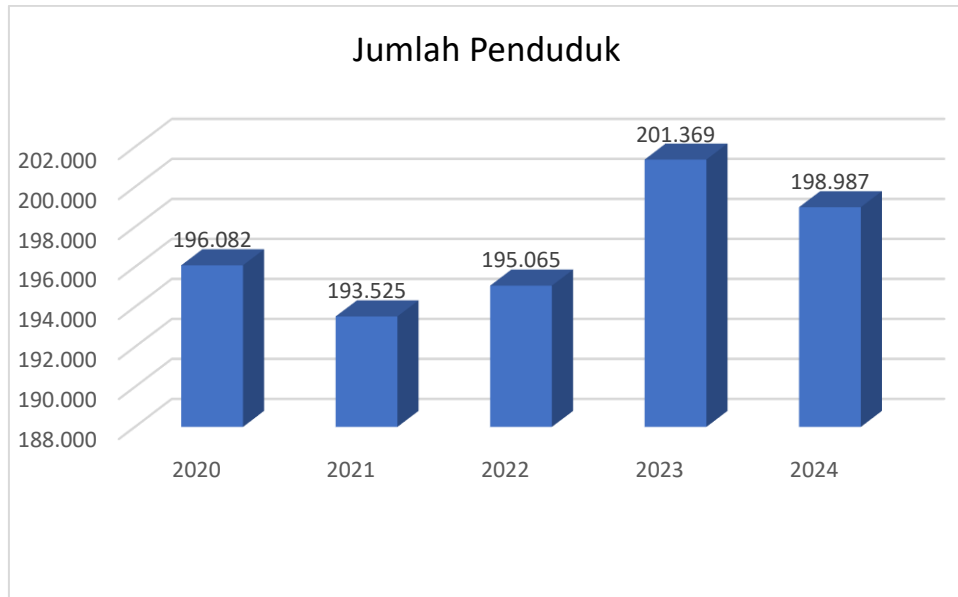
39. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja adalah pengasuhan keluarga pada remaja, di mana remaja adalah anggota keluarga usia 10 - 24 tahun dan belum menikah.
40. Cakupan (Persentase) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) adalah bagian dari populasi penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan.
41. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
42. Rate Nett Recent Migrasi adalah perbandingan selisih antara jumlah migran masuk risen dan migran keluar risen terhadap penduduk yang berpeluang bermigrasi pada suatu wilayah.
43. Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita adalah bagian dari penduduk yang berumur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran baik yang bisa ditunjukkan maupun tidak.
44. Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Cerai adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang Perceraian seseorang setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri.
45. Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Nikah adalah indikator yang mengukur seberapa besar proporsi pasangan menikah yang telah memiliki dokumen resmi berupa akta perkawinan (atau buku nikah), sebagai bukti legal pernikahan di suatu negara.⁰²⁴
46. Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kematian adalah persentase kejadian kematian yang telah dilaporkan dan dicatat secara resmi melalui penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.6. Analisis Situasi dan Capaian Pembangunan Kependudukan

Analisis situasi dan capaian pembangunan kependudukan bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi demografis terkini Kota Salatiga serta menilai capaian program kependudukan pada periode sebelumnya. Bagian ini menjadi landasan penting dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan untuk periode 2025–2029, agar lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan berdasarkan indikator-indikator utama yang mencerminkan dinamika jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan keterpaduan sistem administrasi kependudukan. Selain menyoroti tren capaian positif yang telah diraih, analisis ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih perlu ditangani secara strategis, termasuk ketimpangan sosial, isu kesehatan masyarakat, partisipasi pendidikan, dan distribusi penduduk antarkawasan. Dengan mempertimbangkan data terbaru dan perkembangan sosial ekonomi Kota Salatiga, bagian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menyusun rencana aksi yang lebih operasional, terukur, dan sesuai dengan konteks lokal. Hasil analisis situasi ini juga akan menjadi pijakan untuk menentukan intervensi yang tepat dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan kependudukan secara berkelanjutan.

1.6.1. Jumlah Penduduk dan Proyeksi Penduduk Lima Tahun Kedepan

Perkembangan jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2019 - 2023 terus mengalami fluktuasi, namun tren selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 196.082 jiwa menjadi sebesar 201.369 jiwa di tahun 2023, dan pada tahun 2024 turun lagi menjadi 198.987 jiwa.



Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020 - 2024
Sumber: Dinas Dukcapil Kota Salatiga, 2024

Perkembangan jumlah penduduk Kota Salatiga menurut kelompok umur dan jenis kelamin selama periode waktu tertentu mencerminkan dinamika demografis yang penting untuk dianalisis, karena berpengaruh langsung terhadap arah kebijakan pembangunan, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Informasi mengenai distribusi penduduk berdasarkan variabel tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin (sex)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	6.058	5.632	11.690
2	5-9	7.469	6.956	14.425
3	10-14	7.968	7.553	15.521
4	15-19	8.013	7.599	15.612
5	20-24	7.364	7.068	14.432
6	25-29	7.147	7.274	14.421
7	30-34	7.315	7.083	14.398
8	35-39	6.835	7.078	13.913
9	40-44	8.189	8.425	16.614
10	45-49	7.496	7.587	15.083
11	50-54	6.252	6.664	12.916

12	55-59	5.700	6.396	12.096
13	60-64	4.486	5.162	9.648
14	65-69	3.714	4.142	7.856
15	70-74	2.462	2.668	5.130
16	75+	2.103	3.113	5.216
Salatiga 2024		98.571	100.400	198.971

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Salatiga, 2024

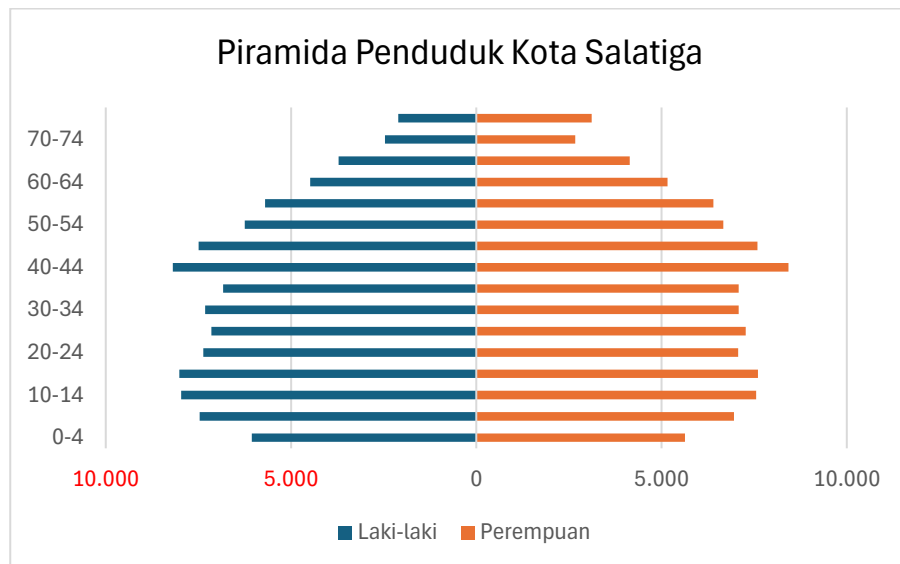
Dilihat berdasarkan karakteristik kelompok umur, sebagian besar penduduk Kota Salatiga pada tahun 2024 adalah perempuan yaitu 100.400 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 98.571 jiwa. Berdasarkan data yang tersaji, piramida penduduk Kota Salatiga menunjukkan karakteristik populasi yang unik dengan implikasi penting bagi pembangunan daerah. Struktur demografis Salatiga menampilkan pola khas masyarakat yang sedang mengalami transisi demografi, ditandai dengan bentuk piramida yang mulai menyempit di bagian dasar namun masih memiliki kelompok usia muda yang signifikan.

Kelompok usia produktif (15-64 tahun) mendominasi dengan proporsi mencapai sekitar 70% dari total populasi, sebuah indikator kuat bahwa Salatiga saat ini berada dalam periode bonus demografi. Fenomena ini sekaligus menjadi tantangan besar dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kelompok usia 40-44 tahun muncul sebagai kelompok terbesar untuk kedua gender, menunjukkan adanya *baby boom* di era 1980-an awal.

Distribusi gender menunjukkan pola yang menarik dimana jumlah perempuan mulai secara konsisten melebihi laki-laki pada kelompok usia 50 tahun ke atas, dengan disparitas yang semakin melebar pada kelompok lansia usia 75+ tahun terdapat 3.113 perempuan dan 2.103 laki-laki. Hal ini sesuai dengan tren global dimana perempuan umumnya memiliki harapan hidup lebih panjang.

Di sisi lain, penyempitan di kelompok usia 0-4 tahun 11.690 jiwa dibandingkan dengan kelompok 5-9 tahun 14.425 jiwa dan 10-14 tahun 15.521 jiwa mengindikasikan keberhasilan program keluarga berencana dan perubahan perilaku reproduksi masyarakat. Namun,

jumlah absolut penduduk usia sekolah yang masih besar menuntut perhatian khusus terhadap kualitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya. Piramida penduduk bisa dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.3 Piramida Penduduk Kota Salatiga

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Salatiga, 2024

Proyeksi penduduk yang digunakan dalam Peta Jalan ini merupakan proyeksi kebijakan yang dirancang untuk mencapai target-target spesifik yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang daerah. Secara spesifik, target jumlah penduduk untuk tahun 2025 sebanyak 198.901 jiwa dan tahun 2030 sebanyak 201.979 jiwa telah diamanatkan secara resmi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Oleh karena itu, laju pertumbuhan penduduk yang diterapkan pada periode 2026-2029 merupakan interpolasi linier yang berfungsi sebagai target pertumbuhan tahunan yang ideal dan terkendali untuk menghubungkan kedua patokan waktu tersebut dan diperlukan untuk memastikan target yang tercantum dalam RPJPD pada tahun 2030 dapat tercapai secara presisi. Metode ini memastikan Peta Jalan ini berfungsi secara efektif sebagai instrumen implementasi yang terukur untuk mencapai visi jangka panjang Kota Salatiga.

Tabel 1.2 Proyeksi Penduduk Kota Salatiga

Indikator	*2025	**2026	**2027	**2028	**2029	*2030
Proyeksi Penduduk	198.201	199.444	199.897	200.530	201.073	201.979

Sumber: *Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga
2030-2045 **Hasil Analisis Tren

Berdasarkan proyeksi yang sudah dibuat, maka dalam kurun waktu 2025-2030 selalu mengalami kenaikan, dan berikut merupakan analisis dari data proyeksi dengan basis data eksisting yang ada pada tahun 2024.

1.6.2. Matriks Analisis Situasi Kependudukan Kota Salatiga

Dinamika penduduk di Kota Salatiga memerlukan pemeriksaan menyeluruh untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan dan evolusi struktur kependudukan. Analisis situasional dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja *Pressure-State-Response-Impact* (PSRI) yang memfasilitasi eksplorasi hubungan sebab-akibat antara tekanan yang berasal dari dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan yang beragam, serta keadaan penduduk yang dihasilkan. Pendekatan metodologis ini memungkinkan identifikasi sejauh mana tekanan eksternal dan internal, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, migrasi, dan disparitas regional, mempengaruhi keseimbangan demografis dan kualitas sumber daya manusia di Kota Salatiga.

Kerangka PSRI juga menyediakan mekanisme untuk menilai tanggapan respon pemerintah daerah, serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan pembangunan penduduk yang telah diberlakukan. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menjelaskan kondisi demografis secara deskriptif tetapi juga menawarkan pemahaman mendalam tentang efektivitas program dan intervensi yang telah dilaksanakan. Hasil analisis PSRI merupakan landasan penting bagi pengembangan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), yang bertujuan agar lebih tepat, ditargetkan, dan didasarkan pada bukti empiris, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Salatiga. Dengan membedah isu-isu kependudukan melalui matriks PSRI, PJPK ini dapat mengidentifikasi secara lebih jelas di mana letak tantangan utama, program apa yang perlu diperkuat, dan bagaimana mengukur keberhasilan intervensi secara sistematis.

1.6.2.1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Tabel 1.3 Matriks analisis situasi kependudukan Pengelolaan Kuantitas Penduduk Kota Salatiga

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
1	Total Fertility Rate (TFR)	- Semakin tingginya pendidikan para perempuan meningkatkan pola pikir dan meningkatkan partisipasinya dalam dunia kerja sehingga menunda perkawinan. - Pergeseran nilai dan norma masyarakat terhadap posisi perempuan dalam sosial yang semakin tinggi dan paradigma mengenai anak dalam keluarga - Dinamika perekonomian yang semakin disruptif mendorong penduduk untuk menunda pernikahan dan menunda seerta meminimalisasi kehamilan - Akses penggunaan kontrasepsi yang semakin tinggi turut mengurangi TFR	- TFR Kota Salatiga adalah sebesar 1,96, lebih rendah daripada <i>replacement level</i> yaitu sebesar 2,1. - Angka TFR Kota Salatiga juga sudah berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yang berada pada 2,03, dan juga di bawah Nasional 2,11. Kota-kota lain di Jawa tengah juga menunjukkan TFR yang lebih tinggi. - TFR Kota Salatiga memiliki tren yang fluktuatif namun cenderung menurun TFR tahun 2020 sebesar 1,53, kemudian 2021 meningkat menjadi 1,9, 2022 sebesar 1,84,	- Rencana aksi diarahkan pada upaya untuk mempertahankan stabilitas nilai TFR - Hal ini dilakukan dengan: penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur	- Stabilitas angka TFR - Stabilitas ppenggunaan kontrasepsi modern - Perubahan persepsi sosial

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
			2023 1,81 Pertumbuhan penduduk menurun, dan masuk kategori sangat lambat	Pendidikan Formal dan Nonformal - Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	
2	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	- Minimnya akses pendidikan reproduksi yang terpadu, tidak adanya konten pendidikan reproduksi dalam kurikulum sekolah ataupun kegiatan ekstrakurikuler di sekolah - Pengaruh media sosial yang semakin masif mendorong pergaulan bebas pada remaja dan mengakibatkan pada kehamilan tidak diinginkan - Luntturnya norma-norma dan religiusitas pada masyarakat yang semakin menormalisasi pergaulan bebas - Kurangnya penegakan regulasi	- ASFR 15-19 Kota Salatiga sebesar 8,9 - Capaian ini sudah melampaui capaian ASFR provinsi Jawa Tengah yaitu 13,70 dan juga melampaui capaian Nasional 18,0 - Namun, angka ini menunjukkan bahwa setiap 1.000 perempuan berusia 15–19 tahun, terdapat sekitar 8,9 kelahiran hidup dalam setahun - Angka ini menunjukkan bahwa kelahiran pada remaja perempuan masih ada dan cukup tinggi	- Edukasi pendidikan kependudukan pada jalur pendidikan formal dan nonformal - Peningkatan peran tokoh masyarakat dan edukasi kepada keluarga - Penguatan program kampung Keluarga Berkualitas (KB) untuk mendukung Program Bangga Kencana - Peningkatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pendidikan kependudukan dan keluarga pada level akar rumput sesuai kearifan lokal	- Menurunnya angka ASFR 15-19 tahun - Semakin dewasanya usia perkawinan dan menurunnya pernikahan dini - Meningkatnya pendidikan dan karir perempuan - Meningkatnya kesadaran perencanaan berkeluarga pada remaja
3	Proporsi Kebutuhan	- Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai KB yang terpercaya sehingga	- Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi di	- Penguatan peran kader dan penyuluh KB	- Meningkatnya proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
	KB yang Terpenuhi	menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi pada masyarakat, utamanya berbagai mitos mengenai berbagai efek samping KB - Kurangnya akses terhadap layanan KB, baik dari segi kesempatan maupun finansial, hingga kualitas layanan yang kurang informatif dan prima - Norma yang masih membudaya di masyarakat, terutama adanya suami dan keluarga yang menolak KB	Kota Salatiga sebesar 81,03% - Provinsi Jawa Tengah 90,70% dan capaian Nasional 89,99% - Capaian ini masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan target SDG's 2030 yaitu sebesar 94,20%	- Penyediaan layanan advokasi, edukasi, informasi, dan konsultasi KB bagi PUS - Pembinaan layanan KBKR di berbagai fasilitas kesehatan - Peningkatan cakupan KB pria - Peningkatan penggunaan MKJP	- Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan - Meningkatnya kehamilan dengan perencanaan yang matang baik jumlah, waktu, ataupun jeda

1.6.2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Tabel 1.4 Matriks analisis situasi kependudukan Peningkatan Kualitas Penduduk Kota Salatiga

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	- Kendala finansial menyebabkan tidak semua anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi	- Rata-rata lama sekolah Kota Salatiga adalah sebesar 11,48 tahun. Capaian ini jauh di atas capaian Provinsi Jawa	- Verifikasi dan validasi data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)	- Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		- Ketersediaan sarana prasarana sekolah maupun transportasi yang belum merata - Kurangnya kesadaran mengenai urgensi pendidikan, pergaulan bebas dan pernikahan dini - Paradigma sekolah mahal dan tidak berdampak besar dalam kehidupan sehingga siswa memilih jalan pragmatis dengan menjadi angkatan kerja usia sekolah	Tengah yang masih berada pada angka 8,47 tahun. Capaian Kota Salatiga juga melampaui capaian Nasional yang masih berada pada angka 9,22 tahun.	- Penguatan program pendidikan nonformal utamanya paket C - Penguatan kolaborasi dengan PKBM - Peningkatan cakupan sekolah ramah anak dan program anti <i>bullying</i> - Penyediaan layanan konseling yang intensif untuk pelajar yang rentan putus sekolah karena tekanan sosial, mental, atau ekonomi - Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran bagi guru dan strategi pembelajaran yang lebih kontekstual dan lebih relevan dengan potensi serta permasalahan daerah - Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas agar lebih relevan dengan potensi dan dunia kerja di Kota Salatiga	

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
2	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	- Mahalnya biaya pendidikan dan akses beasiswa yang tidak merata menyebabkan anak kurang mampu tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi - Tingginya daya serap dunia kerja di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk lulusan SMA/SMK sehingga membuat lulusannya malas melanjutkan ke PT - Daya tampung PTN sedikit dan kualitas PTS rendah - Rendahnya kualitas dan prestasi akademik di pendidikan dasar-menengah dan rendahnya motivasi untuk kuliah	- APK PT sebesar 11,51% pada 2024. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas lulusan SMA/SMK belum melanjutkan ke perguruan tinggi.	- Program beasiswa pendidikan tinggi dari daerah - Menjalin kerja sama pendidikan dengan PT di sekitar Salatiga, termasuk beasiswa putra daerah - Menjalin kerja sama dengan PTN/PTS lokal untuk kuota penerimaan mahasiswa dari daerah - Mendorong perkuliahan berbasis <i>remote education</i> seperti Universitas Terbuka - Mendorong perusahaan atau industri untuk memberikan jam kerja yang lebih fleksibel agar karyawan dapat melanjutkan kuliah - Bimbingan intensif SNBP dan SNBT seperti penyelenggaraan <i>try out</i> - Konseling karier dan edukasi studi lanjut di sekolah-sekolah - Workshop motivasi dan informasi beasiswa PT - Menjalin kerja sama dengan industri dan perusahaan lokal	- Meningkatnya APK perguruan tinggi

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
				untuk program magang mahasiswa - Mengintegrasikan pelatihan kerja bersertifikat dengan perkuliahan - Pemutakhiran data lulusan SMA/SMK yang tidak kuliah - Penyaluran ke program pelatihan, bantuan, atau beasiswa	
3	Persentase Penduduk bersertifikat keahlian	- Rendahnya akses dan informasi ke lembaga sertifikasi - Biaya sertifikasi yang mahal dan kurangnya subsidi baik dari pemerintah maupun perusahaan - Rendahnya kesadaran penduduk terhadap urgensi sertifikasi - Kurikulum pendidikan ataupun pelatihan tidak terintegrasi dengan sertifikasi - Dukungan pemerintah dan pencatatan serta pendataan yang belum efektif - Sertifikat kompetensi belum banyak dijadikan sebagai	- Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi sebesar 1.578. Jumlah ini perlu terus ditingkatkan untuk menjawab tuntutan pasar kerja.	- Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi bidang keahlian yang dibutuhkan dunia kerja lokal seperti las, otomotif, konstruksi, tata boga, digital marketing, tour guide, dll - Menjalin kerja sama dengan LSP untuk menyelenggarakan uji kompetensi bersubsidi - Identifikasi pelaku UMKM atau pekerja informal (tukang, montir, MUA, dll) - Pelatihan singkat dan uji kompetensi langsung di tempat kerja atau program RPL	

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		syarat utama dalam rekrutmen pegawai		- Kerja sama dengan industri lokal untuk penyelenggaraan pelatihan <i>on the job training</i> (OJT) - Integrasi sertifikasi keahlian di sekolah dan perguruan tinggi - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	- Kemiskinan dan ketimpangan sosial di wilayah urban dengan lingkungan padat penduduk, sanitasi buruk, dan dengan beban biaya hidup kota yang tinggi - Kurangnya pengetahuan mengenai pola makan dan asupan gizi seimbang, termasuk soal perawatan anak - Pola makan penduduk, utamanya ibu hamil yang belum memenuhi gizi seimbang	- Prevalensi Stunting di Salatiga sebesar 5,63%, angka tersebut jauh dibawah Jawa Tengah sebesar 20,70% dan nasional 21,50%. Angka prevalensi stunting Kota Salatiga juga sudah mencapai target SDG's 2030 yang sebesar 10%. Angka tersebut perlu dipertahankan.	- Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	Menurunnya angka prevalensi stunting

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		- Tidak semua penduduk kota mampu mengakses layanan kesehatan secara merata - Waktu pengasuhan yang minim karena kesibukan orang tua, utamanya pada 1.000 hari pertama kehidupan anak		- Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat - Pelibatan kader Posyandu, kader PKK, dan ibu-ibu setempat - Pelatihan kader tentang gizi, imunisasi, dan pencatatan pertumbuhan balita - Pemberian makanan tambahan (PMT) lokal yang tepat sasaran untuk balita kurang gizi dan ibu hamil KEK - Program Sekolah Orang Tua Hebat yang memberikan edukasi untuk orang tua balita dan ibu hamil mengenai pola asuh, asupan gizi anak, dan PHBS	
5	Angka Kematian Bayi (AKB)	- Kemiskinan dan ketimpangan sosial di wilayah urban dengan lingkungan padat penduduk, sanitasi buruk, dan dengan beban biaya hidup kota yang tinggi	- AKB di Kota Salatiga terdapat 17 kasus kematian pada tahun 2024. Jumlah kasus kematian bayi masih perlu diturunkan	- Peningkatan kualitas sarana prasarana dan layanan fasilitas kesehatan - Peningkatan pelayanan bagi ibu hamil dan ibu bersalin	- Menurunnya AKB

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		- Ketidakmerataan akses terhadap fasilitas kesehatan, utamanya bagi yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan - Kurangnya perhatian terhadap gizi dan perawatan bayi - Kelahiran premature dan berat badan lahir rendah, terutama karena pola hidup ibu hamil yang tidak sehat dan rendahnya akses ke layanan kesehatan dan edukasi kehamilan selama kehamilan - Kurang efektifnya sistem rujukan pada rumah sakit - Kesibukan orang tua menyebabkan kurangnya imunisasi dan minimnya pemantauan tumbuh kembang		- Reformulasi SOP kegawatdaruratan khususnya untuk ibu melahirkan - Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM kesehatan - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
6	Angka Kematian Ibu (AKI)	- Rendahnya koordinasi layanan kesehatan berjenjang seringkali menyebabkan keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama	- AKI di Kota Salatiga terdapat 2 kasus kematian pada tahun 2024. Jumlah kasus kematian ibu tergolong rendah, namun perlu	- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	- Menurunnya AKI - Meningkatnya efektifitas pelayanan ibu

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		keterlambatan rujukan. Hal ini akan semakin parah apabila terjadi komplikasi kehamilan - Kurangnya pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan, atau bahkan diperparah dengan usia ibu hamil yang tidak ideal - Kurangnya pemeriksaan kehamilan yang berkualitas, apalagi apabila ibu hamil memiliki penyakit penyerta - Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di perkotaan menyebabkan ibu hamil tidak memiliki akses memadai terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas	diperhatikan kedepannya agar keselamatan Ibu menjadi prioritas.	- Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan - Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM kesehatan - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	hamil dan melahirkan
7	Tingkat Kemiskinan	- Rendahnya pendidikan dan keterampilan penduduk sehingga tidak dapat bersaing dalam pekerjaan sektor formal. Hal ini diperparah	- Tingkat Kemiskinan Kota Salatiga sebesar 4,57%. Angka tersebut sudah mencapai target Jawa Tengah yang sebesar 8,57% dan sudah	- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Validasi dan verifikasi data penduduk miskin penerima	- Menurnnya angka kemiskinan - Meningkatnya kesejahteraan

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		dengan tingginya biaya hidup di kota. - Kesempatan kerja yang terbatas dan tidak layak serta upah rendah tanpa jaminan sosial dan kepastian kerja - Urbanisasi yang tinggi menyebabkan tumbuhnya kawasan padat penduduk dengan kualitas lingkungan dan sanitasi yang kurang baik - Kurangnya akses terhadap modal usaha dan layanan keuangan yang aman - Jumlah lapangan pekerjaan di sektor formal tidak mampu menampung jumlah angkatan kerja	mencapai target nasional juga sebesar 9,58%, serta hampir mencapai target SDG's pada tahun 2030 yaitu sebesar 4,33%	- bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat - Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi masyarakat penerima bantuan pemerintah (menjahit, kuliner, dll) - Bantuan permodalan usaha mikro melalui koperasi	ekonomi penduduk
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita	- Norma sosial dan budaya patriarki yang memandang perempuan harus di rumah dan tidak boleh bekerja. Perempuan seringkali dibebani peran dan beban ganda baik domestic maupun public	- TPAK Wanita Kota Salatiga sebesar 61,65% pada tahun 2024, angka ini sudah mencapai target Jawa Tengah sebesar 61,82%	- Pelatihan keterampilan atau vokasional khusus untuk perempuan, misalnya menjahit, desain grafis, kuliner, pengolahan makanan, <i>e-commerce</i>, dan pemasaran digital - Sosialisasi kepada perusahaan untuk menyediakan fasilitas	Meningkatnya TPAK wanita

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		- Diskriminasi gender dalam pasar kerja yang menganggap perempuan kurang fleksibel dan kurang bisa diandalkan - Minimnya fasilitas pendukung perempuan bekerja, misalnya kurangnya <i>daycare</i>, cuti melahirkan yang layak, hingga ruang laktasi - Kurangnya pendidikan dan keterampilan pada perempuan - Ketergantungan pada pekerjaan informal yang mana seringkali tidak tercatat sebagai angkatan kerja		- ramah perempuan di tempat kerja seperti ruang laktasi, penitipan anak, dan jam kerja yang lebih fleksibel - Pelatihan kerja WFA untuk perempuan, misalkan menjadi admin media sosial, penerjemah, hingga <i>freelancer</i> desain - Inkubasi usaha mikro berbasis rumah tangga	
9	Persentase Pekerja Informal	- Terbatasnya lapangan kerja pada sektor formal sehingga tidak dapat menampung seluruh angkatan kerja - Rendahnya tingkat pendidikan penduduk sehingga tidak memenuhi syarat untuk bekerja pada sektor formal - Fleksibilitas dan akses yang mudah ke sektor informal	- Persentase Pekerja Informal 40,63% pada 2024. Angka tersebut masih perlu ditingkatkan	- Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi pencari kerja - Job fair - Peningkatan akses dan informasi pekerjaan pada berbagai perusahaan industri di Salatiga	- Meningkatnya pekerja sektor formal dan menurunnya pekerja sektor informal

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		- Desakan ekonomi karena biaya hidup yang tinggi menyebabkan penduduk memilih bekerja apapun demi bertahan hidup - Hambatan administrasi dan regulasi yang kaku pada sektor formal menghalangi penduduk miskin dan termarginal untuk mengakses pekerjaan pada sektor formal			
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	- Masih melanggengnya stigma negative terhadap penyandang disabilitas di lingkungan kerja - Belum adanya kebijakan baku mengenai inklusifitas dalam dunia kerja dan banyak tempat kerja yang tidak memiliki aksesibilitas fisik maupun digital yang ramah terhadap penyandang disabilitas - Rata-rata penyandang disabilitas memiliki tingkat pendidikan rendah dan juga tidak memperoleh pelatihan	- Persentase penyandang disabilitas 1,60 % pada 2024. Angka ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan inklusivitas pembangunan	- Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi para disabilitas - Job fair - Penyaluran tenaga kerja disabilitas	- Meningkatnya persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		khusus karena sudah menjadi masalah sistemik - Kurangnya penempatan kerja dan juga kurangnya informasi serta jaringan			
11	Gini Ratio	- Ketimpangan akses terhadap lapangan kerja formal. Hal ini juga berhubungan dengan perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk yang juga disebabkan oleh ketimpangan pendapatan dan kemampuan ekonomi penduduk - Konsentrasi kekayaan di segmen kecil penduduk dan diperparah dengan kebijakan perpajakan dan redistribusi yang kurang efektif dan kurang tepat sasaran - Kurang meratanya akses terhadap teknologi dan informasi serta kurangnya akses terhadap modal usaha dan kredit yang aman dan terpercaya - Aglomerasi pembangunan pada wilayah tertentu yang	- Gini Rasio Kota Salatiga sebesar 0,387%. Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran yang sedang, namun perlu diwaspadai agar tidak meningkat. Selain itu Gini Rasio Kota Salatiga masih perlu diturunkan guna mencapai target Jawa Tengah sebesar 0,364% dan target SDG's 2030 sebesar 0,363%	- Peningkatan ketepatan sasaran program perlindungan sosial - Pembangunan kota inklusif - Peningkatan keterampilan kerja - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (UMKM dan ekonomi informal)	- Menurnnya indeks gini - Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak inklusif, menyebabkan kesenjangan konsumsi dan gaya hidup serta kepemilikan aset			
12	PDRB Perkapita	- Belum semua sektor perekonomian memiliki nilai tambah yang tinggi, apalagi jika pekerja di sektor informal masih banyak - Investasi dan industri unggulan masih perlu terus ditingkatkan - Produktivitas penduduk masih perlu terus ditingkatkan - Kota tidak selalu menjadi pusat produksi, melainkan menjadi pusat konsumsi sehingga tidak menghasilkan PAD yang signifikan	- PDRB Kota Salatiga 90,49- 91,10 juta rupiah. Angka ini terus meningkat, menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah yang positif. Sudah melebihi PDRB Jawa Tengah sebesar 47,97 juta rupiah dan Nasional 78,61 juta rupiah	- Pemberian dukungan maksimal bagi sektor usaha mikro baik berupa dukungan modal, keterampilan produksi dan pemasaran, perizinan, sertifikasi, dll. - Peningkatan iklim investasi yang berkelanjutan sesuai dengan potensi lokal. - Peningkatan potensi, daya tarik, fasilitas, dan marketing pariwisata - Peningkatan industri kreatif utamanya bidang kesenian budaya dan pariwisata - Peningkatan produktivitas sektor industri yang berbasis pada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal - Penguatan sektor perdagangan	- Meningkatnya pendapatan daerah dari berbagai sektor, baik UMKM, wisata, perdagangan, industri

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	- Urbanisasi tinggi tanpa perluasan lapangan kerja, diperparah dengan tingginya penduduk usia produktif (angkatan kerja) yang tidak diimbangi dengan kesempatan kerja di sektor formal. - Kurangnya keterampilan penduduk yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau bahkan adanya <i>mismatch</i> antara pendidikan dengan kebutuhan di dunia kerja - Tingginya digitalisasi dan otomasi juga mengurangi kesempatan kerja bagi penduduk - Tingginya harapan gaji dan status sosial sehingga penduduk dengan kualifikasi pendidik tinggi enggan bekerja pada sektor informal ataupun dengan gaji rendah, apalagi ditambah dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sering terjadi pada sektor formal	- TPT Kota Salatiga 3,86%. Tren menurun ini positif, namun masih menjadi tantangan di tengah melimpahnya usia produktif dan perlu dipertahankan kedepannya. Angka ini sudah mencapai target Jawa Tengah 4,78%, kemudian Nasional 4,91% dan hampir mencapai Target SDG's tahun 2030 sebesar 3,80%	- Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi pencari kerja - Job fair - Peningkatan akses dan informasi pekerjaan pada berbagai perusahaan industri di Salatiga	- Meningkatnya kesempatan kerja - Menurunnya TPT

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
14	Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi	- Masih banyaknya pekerja di sektor informal yang tidak mengharuskan memiliki NPWP, atau bahkan adanya kesengajaan penghindaran pajak, terutama pada para <i>freelancer</i> ataupun pengusaha digital - Masih kurangnya literasi pajak, diperparah dengan paradigma penduduk yang menganggap sistem dan prosedur birokrasi bersifat rumit, serta ketakutan atau ketidaknyamanan terhadap sistem pajak - Minimnya pengawasan, penegakan atau insentif kepemilikan - Kurangnya kolaborasi antar <i>stakeholder</i>, misalnya antara Dukcapil dengan DJP yang menghambat efektifitas pendataan wajib pajak	- Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi Kota Salatiga Sebesar 34%. Angka ini masih perlu ditingkatkan.	- Edukasi perpajakan kepada masyarakat - Pemberian layanan jemput bola dan kerja sama dengan berbagai perusahaan di Kota Salatiga - Peningkatan layanan daring - Kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> baik dunia usaha, perguruan tinggi, maupun OPD lainnya.	- Meningkatnya persentase kepemilikan NPWP - Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak

1.6.2.3. Pembangunan Keluarga

Tabel 1.5 Matriks analisis situasi kependudukan Pembangunan Keluarga Kota Salatiga

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
1	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	- Ketidakstabilan ekonomi keluarga karena pekerjaan di sektor informal dengan tuntutan biaya hidup di kota yang tinggi - Kondisi hunian yang tidak layak dan lingkungan yang padat penduduk - Tingginya beban kerja penduduk perkotaan menyebabkan waktu berkualitas atau <i>family time</i> berkurang, diperparah dengan gaya hidup urban yang individualisme - Kurangnya kesiapan berkeluarga, rendahnya literasi keluarga, dan pernikahan dini yang disebabkan oleh pergaulan bebas, yang mana nantinya sering bermuara pada KDRT - Pergaulan bebas di perkotaan dan kurangnya pengasuhan anak karena kesibukan orang	- Ibangga Kota Salatiga sebesar 67,3%. Angka ini menunjukkan kualitas keluarga yang cukup baik, namun perlu terus ditingkatkan terutama pada dimensi kemandirian. Selain itu Ibangga Kota Salatiga sudah mencapai target Jawa Tengah 63,9%. Kedepannya masih perlu ditingkatkan kembali.	- Edukasi dan advokasi mengenai kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan untuk mencegah KDRT - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan efektifitas program pembinaan dan pendidikan keluarga seperti BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dll. - Peningkatan peran organisasi tingkat akar rumput dan tokoh masyarakat - Penguatan program pembangunan keluarga dan kampung KB - Edukasi pembangunan keluarga melalui pendidikan formal dan nonformal	- Meningkatnya kualitas keluarga - Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan keluarga

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		tua dan lingkungan yang kurang supportif - Program pemberdayaan perempuan yang belum menjangkau seluruh keluarga yang rentan secara merata		- Peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi keluarga	
2	Indeks Perlindungan Anak	- Tingginya tuntutan ekonomi di kota yang menyebabkan waktu orang tua habis untuk bekerja - Literasi perlindungan anak yang rendah di kalangan keluarga dan masyarakat dan minimnya pelibatan anak dalam pengambilan keputusan - Lingkungan yang tidak kondusif, sanitasi yang kurang baik, dan permukiman padat penduduk - Pergaulan bebas di kawasan perkotaan yang semakin masif - Penggunaan sosial media yang tidak bijaksana pada anak-anak menyebabkan mereka rentan mengakses konten tidak tepat	- Indeks Perlindungan Anak Kota Salatiga sebesar 72%. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak terjamin dan sudah cukup tinggi, karena sudah mencapai target Jawa Tengah sebesar 65%	- Penyusunan database anak - Pemberian bantuan pada anak-anak terlantar, anak yatim piatu, dan anak-anak yang merupakan bagian dari PMKS - Edukasi mengenai pemenuhan hak anak - Penguatan layanan peningkatan kualitas hidup anak - Peningkatan program pencegahan KTA - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak	- Meningkatnya indeks perlindungan anak - Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak
3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,	- Rendahnya daya beli dan pendapatan rumah tangga karena harga lahan dan	- Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Kota	- Perbaikan rumah tidak layak huni - Identifikasi wilayah rawan slum area untuk dibangun	- Meningkatnya kualitas lingkungan dan perumahan serta

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
	Terjangkau, dan Berkelanjutan	property di Kota Salatiga semakin naik setiap waktunya - Angka urbanisasi yang terus meningkat - Munculnya hunian tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan akibat tingginya harga tanah dan property - Regulasi mengenai pertanahan yang masih belum efektif	Salatiga 94,8%. Angka ini sudah tinggi dan perlu dipertahankan. Selain itu sudah mencapai target dari Jawa Tengah sebesar 71,28% dan target SDG's tahun 2030 sebesar 68,06%	- kembali agar tidak menjadi kumuh - Bantuan rumah layak huni bagi keluarga pra sejahtera - Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	permukiman penduduk - Meningkatnya kesehatan dan kesejahteraan penduduk
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	- Kepadatan penduduk di Kota menyebabkan lahan kosong semakin menipis dan berimplikasi pada kurangnya pembangunan sanitasi yang layak - Rendahnya budaya PHBS pada penduduk - Kurangnya sistem penyedotan dan pengolahan lumpur tinja, termasuk infrastruktur sanitasi skala kota yang belum terintegrasi dengan baik dan efektif serta merata	- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Salatiga 15%. Angka yang masih rendah ini menunjukkan tantangan besar dalam kesehatan lingkungan. Angka ini sudah mencapai target Jawa Tengah sebesar 9,72%. Namun masih jauh dari target SDG's tahun 2030 yang sebesar 100%	- Peningkatan efektifitas sistem penyediaan air minum di perkotaan - Peningkatan efektifitas dan cakupan pengelolaan sistem air limbah domestic - Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terpadu dan efektif - Peningkatan budaya PHBS pada masyarakat - Peningkatan pengawasan pada wilayah padat penduduk	- Meningkatnya kesehatan lingkungan penduduk - Meningkatnya kualitas sanitasi dan keamanan sanitasi penduduk

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		- Pengawasan yang kurang, terutama pada kawasan padat penduduk			
5	Indeks Lansia Berdaya	- Banyaknya anak yang merantau menyebabkan lansia hidup sendiri sehingga menjadi rentan, diperparah kultur masyarakat kota yang individualis semakin memperparah kerentanan lansia - Lansia tidak memiliki pekerjaan, tidak selalu memiliki tabungan ataupun pensiun - Kurangnya program pemberdayaan lansia baik program sosial, ekonomi, kesehatan, ataupun penyediaan fasilitas kota yang ramah lansia - Tidak semua lansia memiliki jaminan kesehatan yang merupakan kebutuhan pokok lansia, dan tidak semuanya terdata secara sistematis dalam program perlindungan sosial - Lansia sering dianggap beban sehingga kurang dilibatkan	- Indeks Lansia Berdaya Kota Salatiga 55,6%. Proyeksi penduduk menunjukkan jumlah lansia akan meningkat pesat, sehingga isu ini menjadi sangat strategis. Angka ini sedikit lebih rendah dari Jawa Tengah yang sebesar 58,59%	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, khususnya Lansia - Edukasi PHBS bagi Lansia - Pemberian bantuan pada Lansia pra sejahtera - Bantuan Jaminan Kesehatan bagi Lansia - Pemberdayaan Lansia dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat	- Meningkatnya kemandirian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesehatan lansia

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat			
6	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	- Tingginya tuntutan ekonomi di kota yang menyebabkan waktu orang tua habis untuk bekerja - Pergaulan bebas di kawasan perkotaan yang semakin masif dan lingkungan sosial perkotaan yang individualistik - Penggunaan sosial media yang tidak bijaksana pada anak-anak menyebabkan mereka rentan mengakses konten negative - Banyak orang tua yang tidak memahami kebutuhan psikologis remaja, kurangnya literasi parenting, dan komunikasi yang tidak terbuka antara orang tua dengan remaja	- Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja Kota Salatiga 92,10%. Ini menunjukkan sebagian besar keluarga memiliki remaja, sehingga program pengasuhan remaja sangat relevan. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja Kota Salatiga juga sudah mencapai target Jawa Tengah yang sebesar 86,49%	- Peningkatan edukasi dan promosi serta sosialisasi kegiatan Bina Keluarga Remaja - Peningkatan efektifitas dan kelengkapan sarana prasarana kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	- Meningkatnya indeks pengasuhan remaja - Menurunnya kenakalan remaja
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	- Penduduk kota masih banyak yang bekerja di sektor informal dan tidak tetap sehingga tidak selalu didaftarkan oleh perusahaan tempat kerjanya ke BPJS - Tingginya biaya hidup perkotaan dan kehidupan yang miskin menyebabkan jaminan	- Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Salatiga 88,72%. Angka ini sudah tinggi dan memenuhi target Jawa Tengah yang sebesar 70,90%. Namun masih perlu ditingkatkan	- Edukasi urgensi jaminan kesehatan pada masyarakat - Verifikasi dan validasi data penerima jaminan kesehatan gratis dari pemerintah (PBI) - Peningkatan koordinasi pada level akar rumput, baik RT, RW, maupun kelurahan mengenai anggota	- Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

No	Indikator	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Response</i>	<i>Impact</i>
		kesehatan tidak menjadi prioritas, dan tidak semua rumah tangga miskin terdata sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat yang gratis dari pemerintah - Tunggakan iuran oleh peserta mandiri yang menyebabkan status kepesertaannya menjadi nonaktif - Paradigma yang menganggap jaminan kesehatan tidak penting karena merasa akan hidup sehat terus menerus - Adanya peralihan kepesertaan jaminan kesehatan nasional ke asuransi swasta, utamanya penduduk segmen menengah ke atas	kedepannya menjadi 100% sebagai target SDG's pada tahun 2030 yaitu 100%	- masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan - Kerja sama dengan dunia usaha dan industri mengenai jaminan kesehatan karyawan	

1.6.2.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Tabel 1.6 Matriks analisis situasi kependudukan Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Penduduk Kota Salatiga

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
1	Persentase Kampung Keluarga berkualitas Mandiri	- Kultur masyarakat urban di Kota Salatiga menyebabkan oenduduk memiliki ruang komunitas dan interaksi sosial yang minim, sehingga partisipasi penduduuk dalam berbagai kegiatan dan forum menjadi kurang - Penduduk yang padat dan terbatasnya ruang fisik turut menghambat pelaksanaan kegiatan kampung KB - Kader atau SDM penggerak yang konsisten sulit ditemukan karena penduduk kota lebih berorientasi pada profit dan materealistis, serta memiliki mobilitas yang tinggi - Lemahnya kolaborasi antar sektor - Minimnya monitoring dan evaluasi secara berkela	- Persentase Kampung Keluarga berkualitas Mandiri Kota Salatiga 56,50%. Capaian ini sudah di atas rata-rata Jawa Tengah dan Nasional	- Peningkatan kapasitas kelembagaan kampung KB - Penguatan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi kader atau pengelola kampung KB melalui pelatihan Pokja kampung KB - Pelatihan keterampilan usaha untuk kampung KB (misal: kuliner, kerajinan, digital marketing, dll) - Integrasi program lintas sektor (8 fungsi keluarga), meliputi : BKB, BKR, BKL, pelayanan posyandu terpadu dengan promosi gizi dan stunting, pendidikan parenting, dll. - Kolaborasi yang kuat dengan PKK, karang taruna, kader Posyandu, UMKM, mitra swasta, dll - Peningkatan digitalisasi kampung KB, untuk mendukung Rumah Dataku	- Meningkatnya kampung KB mandiri - Terwujudnya kesehatan bayi dan ibu hamil, lansia, remaja, dll - Terwujudnya keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera - Meningkatnya indikator i-bangga

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
2	Kepadatan Penduduk	- Tingginya faktor penarik di Kota Salatiga, baik berupa kesempatan ekonomi, pendidikan, fasilitas public yang lebih lengkap, serta teknologi informasi yang lebih canggih - Faktor pendorong dari wilayah sekitar yang merupakan daerah agraris dengan kesempatan ekonomi formal yang kurang dan fasilitas yang kurang memadai - Belum meratanya pusat pertumbuhan wilayah dan belum masifnya multiplier effect yang positif pada pusat pertumbuhan yang telah dibangun menyebabkan urbanisasi masih terus terjadi	- Kepadatan penduduk Kota Salatiga sekitar 3.619 jiwa/km².	- Penguatan pusat pertumbuhan baru (growth center) di Kota Salatiga sebagai pelopor perekonomian yang akan mencegah berpindahnya penduduk Kota Salatiga - Peningkatan keterkaitan antara desa dengan kota untuk mengurangi perpindahan penduduk - Pengembangan ekonomi lokal di kawasan sekitar Salatiga utamanya di kawasan peri peri untuk mencegah berpindahnya penduduk ke Kota Salatiga - Distribusi penduduk melalui program transmigrasi	- Berkurangnya penduduk yang pindah dan datang ke Kota Salatiga - Urbanisasi dapat ditekan dengan baik

1.6.2.5. Integrasi Data Kependudukan

Tabel 1.7 Matriks analisis situasi kependudukan Integrasi Data Kependudukan Kota Salatiga

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
1	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	- Tingginya mobilitas pada penduduk Kota Salatiga dan domisili yang tidak sesuai KTP menyebabkan penduduk enggan dan cenderung menunda pengurusan akta kelahiran anak - Tingginya kesibukan penduduk kota dalam pekerjaan sehingga enggan untuk meluangkan waktu mengurus dokumen kependudukan - Masih mengakarnya paradigma masyarakat bahwa mengurus administrasi dan registrasi penduduk adalah hal yang rumit karena prosedur birokrasi yang berbelit-belit - Penduduk merasa belum membutuhkan dokumen secara mendesak	- Cakupan Akta Lahir 99,84% pada 2024. Angka ini sangat tinggi, tantangannya adalah meningkatkan hingga menjangkau seluruhnya	- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan - Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	- Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan - Meningkatnya efektifitas pencatatan sipil dan registrasi penduduk - Meningkatnya kevalidan data kependudukan
2	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	- Perceraian yang tidak dilakukan melalui proses pengadilan karena biaya	- Cakupan Akta Cerai 87,03% pada 2024. Data ini penting untuk kepastian status	- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	- Terwujudnya ketertiban administrasi dan

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
		pengadilan dan proses hukum yang dianggap berat - Minimnya literasi dan pengetahuan hukum - Stigma sosial dan kekhawatiran status anak - Penduduk merasa belum membutuhkan dokumen secara mendesak	hukum individu pasca-perceraian	- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	kepastian hukum bagi penduduk yang mengalami perceraian
3	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	- Pernikahan siri yang tidak dicatatkan secara hukum, poligami, ataupun pernikahan beda kewarganegaraan dan beda agama - Biaya dan prosedur yang dianggap rumit oleh penduduk - Mobilitas yang tinggi dan status domisili yang tidak sinkron - Penduduk merasa belum membutuhkan dokumen secara mendesak	- Cakupan Akta Nikah 42,17% pada 2024. Angka ini menunjukkan masih banyak perkawinan yang belum tercatat secara resmi oleh negara.	- Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data	Terwujudnya kepastian hukum dalam perkawinan dan perlindungan hak-hak pasangan dan anak.
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	- Penduduk merasa belum membutuhkan dokumen secara mendesak, apalagi jika tidak ada kepentingan hukum langsung	- Cakupan Akta Kematian 1.586 pada 2024. Pelaporan kematian sangat penting untuk pemutakhiran data.		Terwujudnya data kependudukan yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan pembangunan.

No	Indikator	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Response</i>	<i>Impact</i>
		- Kendala pelaporan dan dokumen pendukung - Tidak adanya sanksi atau insentif yang signifikan		Kependudukan terkait Pencatatan Sipil - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

1.7. Isu Strategis

Berdasarkan analisis kondisi aktual kependudukan Kota Salatiga, teridentifikasi beberapa isu strategis yang perlu menjadi fokus utama dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan periode 2025-2029. Isu-isu ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang akan menentukan keberhasilan Kota Salatiga dalam mengkonversi potensi demografinya menjadi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

- a. TFR yang semakin setiap tahunnya, berdampak pada kekurangan tenaga kerja, peningkatan beban ekonomi bagi generasi produktif, serta melemahkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan di masa depan
- b. Kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (*unmet need*), di mana capaian *Demand Satisfied* baru mencapai 81,03%.

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

- a. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 61,65%. Angka ini perlu ditingkatkan sebagai bentuk mengurangi ketimpangan gender dan menopang keberlanjutan pembangunan
- b. Pekerja di sektor informal, mencapai 40,63% dari total angkatan kerja. Kondisi ini perlu diturunkan karena dapat menyebabkan kerentanan ekonomi, produktivitas rendah, dan terbatasnya akses pekerja terhadap perlindungan jaminan sosial.
- c. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal masih 1,60%. Angka ini perlu ditingkatkan karena memberikan kesempatan yang setara, mengurangi diskriminasi, serta memanfaatkan potensi dan keterampilan penyandang disabilitas.

3. Pembangunan Keluarga

- a. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) sebesar 67,3. Perlunya peningkatan i-Bangga karena memperkuat kualitas keluarga dalam aspek ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan, yang menjadi fondasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan nasional.

- b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) masih sekitar 15%. Peningkatannya dapat mengurangi risiko penyakit menular, menjaga kebersihan lingkungan, serta mendukung tercapainya target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang kesehatan, air bersih, dan sanitasi layak.
 - c. Indeks Lansia Berdaya sebesar 55,6. Peningkatannya penting untuk mewujudkan lansia yang sehat, produktif, dan bermartabat, serta mengurangi beban ketergantungan.
- 4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
 - a. Persentase Kampung Keluarga berkualitas Mandiri sebesar 56,5. Perlunya Peningkatan persentasenya agar dapat memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, serta mendorong terwujudnya pembangunan keluarga yang berkelanjutan dan mandiri di tingkat akar rumput.
 - b. Kepadatan rata-rata penduduk Kota Salatiga adalah 3.619 jiwa/km². Terdapat indikasi adanya konsentrasi penduduk yang tidak merata di antara empat kecamatan di Kota Salatiga. Kecamatan Sidomukti dan Sidorejo cenderung lebih padat dibandingkan Argomulyo dan Tingkir. Isu strategis yang muncul adalah risiko terjadinya ketimpangan pembangunan dan aksesibilitas terhadap fasilitas ekonomi, sosial, dan kesehatan antar wilayah. Tanpa adanya kebijakan pengarahannya mobilitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur, wilayah dengan kepadatan rendah bisa tertinggal, sementara wilayah dengan kepadatan tinggi akan mengalami tekanan lingkungan dan sosial yang semakin berat.
- 5. Penataan Administrasi dan Data Kependudukan
 - a. Peningkatan Akurasi dan Integrasi Data Kependudukan untuk Perencanaan Berbasis Bukti, Keberhasilan seluruh strategi di atas sangat bergantung pada ketersediaan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Isu strategisnya adalah bagaimana memastikan data yang berasal dari berbagai sumber (BPS, Disdukcapil, OPD Teknis) dapat disatukan dalam satu sistem informasi yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh para perencana kebijakan. Tanpa data

yang solid, perencanaan akan bersifat reaktif dan tidak tepat sasaran. Penguatan sistem administrasi kependudukan menjadi prasyarat untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang berbasis bukti (*evidence-based planning*).

BAB II

SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pembangunan kependudukan dapat dilihat secara lebih terukur dan terarah melalui penjabaran data dari indikator-indikator kunci yang merepresentasikan tujuan strategis dalam berbagai aspek kependudukan. Setiap indikator disusun dengan target tahunan selama periode 2025–2029 guna memudahkan pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.

2.1. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Pengelolaan Kuantitas Penduduk

1. Arah Kebijakan

Penguatan efektivitas program pengelolaan jumlah penduduk melalui layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau.

2. Strategi

- a. Meningkatkan cakupan dan kualitas edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja melalui integrasi kurikulum pendidikan serta penguatan peran komunitas, guna menunda usia kawin pertama dan mencegah kehamilan tidak diinginkan;
- b. Mengurangi beban biaya pengasuhan dan pendidikan anak melalui insentif dan program perlindungan sosial, guna mendorong keputusan berkeluarga yang terencana dan pencapaian fertilitas yang seimbang;
- c. Memperkuat sosialisasi dan kampanye program keluarga berencana berbasis budaya lokal dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda, khususnya di wilayah dengan tingkat kelahiran tinggi;
- d. Memperluas akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi yang berkualitas, inklusif, dan menyeluruh di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

3. Target Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Pengendalian kuantitas penduduk mengacu pada variabel yang mempengaruhi jumlah dan dinamika populasi, seperti angka fertilitas total (TFR), angka kelahiran spesifik usia (ASFR) usia 15-19 tahun dan Proporsi

kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern. Berikut merupakan tabel mengenai target Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Salatiga tahun 2025-2029.

Tabel 2.1 Target Pengelolaan Kuantitas Penduduk Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Tujuan/sasaran strategis	Indikator	Baseline	Sumber	Target				
		2024		2025	2026	2027	2028	2029
Mengarahkan laju pertumbuhan penduduk agar tetap seimbang	Total Fertility Rate (TFR)	1,96	DP3AP2KB	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	8,9	DP3AP2KB	8,1	7,4	6,9	6,3	5,8
	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	81,03	DP3AP2KB	81,9	82,7	83,5	84,3	85

2.2. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Peningkatan Kualitas Penduduk

1. Arah Kebijakan

Transformasi sistem pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan bonus demografi secara inklusif.

2. Strategi

- Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah;
- Peningkatan keselarasan antara pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja;
- Percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi, sanitasi layak, dan edukasi kesehatan masyarakat;

- d. Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan perlindungan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan

3. Target Peningkatan Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk menunjukkan kualitas kehidupan di suatu daerah dan sejauh mana kesejahteraan penduduk dicapai. Kualitas penduduk mencerminkan kondisi penduduk baik secara fisik maupun nonfisik, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan ekonomi, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk memiliki kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai orang yang bertakwa, berbudaya, dan berkepribadian. Di era modern, pembangunan kependudukan tidak hanya harus berfokus pada kuantitas penduduk; itu juga harus berfokus pada penduduk yang berkualitas tinggi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan global. Tiga komponen utama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi diutamakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.2 Target Peningkatan Kualitas Penduduk Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Tujuan/sasaran strategis	Indikator	Baseline	Sumber	Target				
		2024		2025	2026	2027	2028	2029
Pendidikan								
Pembangunan manusia secara menyeluruh dan inklusif dari aspek pendidikan, kesehatan dan	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	11,48	BPS	11,49	11,50	11,51	11,52	11,53
	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	11,51						

Tujuan/sasaran strategis	Indikator	Baseline	Sumber	Target				
		2024		2025	2026	2027	2028	2029
ketenagakerjaan	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	1.578		1.635	1.721	1.803	1.917	2.113
Kesehatan								
Pembangunan manusia secara menyeluruh dan inklusif dari aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	5,69	DINKES	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
	Angka Kematian Bayi	17	DINKES	15	14	13	12	11
	Angka Kematian Ibu	2	DINKES	2	1	1	1	1
Ekonomi								
Pembangunan manusia secara menyeluruh dan inklusif dari aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	4,57	BPS	4,49-3,81	4,40-3,39	4,32-2,96	4,23-2,54	4,23 - 2,54
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	61,65%		65,2%	65,9%	66,6%	67,2%	68,01%
	Persentase Pekerja Informal	40,63	BPS	39,81	38,92	38,05	37,17	36
	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	1,60		1,64	1,70	1,76	1,83	1,91
	Gini Rasio	0,387	BPS	0,372	0,357	0,342	0,327	0,312

Tujuan/sasaran strategis	Indikator	Baseline	Sumber	Target				
		2024		2025	2026	2027	2028	2029
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	90,49-91,10	BPS	90,49-136,1	90,69-181,1	90,89-215,1	91,11-226,11	91,11-226,11
	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86	BPS	3.84-3.54	3.84-3.55	3.84-3.56	3.84-3.57	3.84-3.58
	Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi	34%						

2.3.Arah Kebijakan, Strategi dan Target Strategi Pembangunan Keluarga

1. Arah Kebijakan

Penguatan ketahanan dan fungsi keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas

2. Strategi

- Edukasi pranikah, literasi keuangan rumah tangga, dan layanan konseling keluarga;
- Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung kebijakan ramah keluarga;
- Penyediaan layanan dukungan keluarga berbasis komunitas seperti ruang bermain anak dan pusat pembelajaran keluarga;
- Penguatan peran keluarga dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak;
- Penguatan ketahanan psikososial keluarga dalam menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan budaya

3. Target Strategi Pembangunan Keluarga

Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga agar mampu hidup sejahtera, mandiri, dan harmonis. Tujuan pembangunan keluarga adalah

untuk meningkatkan fungsi-fungsi keluarga seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan fokus pada aspek ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Tujuan akhirnya adalah membangun keluarga yang baik, yang akan berkontribusi pada pertumbuhan sumber daya manusia dan kesejahteraan negara.

Tabel 2.3 Target Strategi Pembangunan Keluarga Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Tujuan/sasaran strategis	Indikator	Baseline	Sumber	Target				
		2024		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatkan kualitas keluarga untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan masa depan yang sejahtera dan bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	67,3		67,7	68,1	68,6	69,2	70
	Indeks Perlindungan Anak	72		72,3	72,5	72,7	73	73,2
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	94,8		95,5	96	96,5	97	97,5
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	15		19,4	23,8	28,2	32,5	36,9
	Indeks Lansia Berdaya	55,6		56,1	56,6	57,1	57,5	58
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	92,1		92,6	93,1	93,6	94	94,4
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	94,18		94,90	95,52	96,10	96,92	97,3

2.4.Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

1. Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas hidup di kawasan perkotaan dan perdesaan melalui pemerataan pembangunan, penataan penduduk, dan tata ruang berkelanjutan

2. Strategi

- a. Revitalisasi kawasan perdesaan dengan penyediaan layanan dasar yang merata, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa;
- b. Penataan ruang perkotaan secara adaptif dan berkelanjutan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan permukiman padat, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

3. Target Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya untuk mengatur distribusi penduduk agar lebih seimbang antarwilayah dan mengontrol perpindahan penduduk untuk mendukung pemerataan pembangunan dikenal sebagai pemantauan perpindahan penduduk.

Tabel 2. 4 Target Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Tujuan/sasaran strategis	Indikator	Baseline	Sumber	Target				
		2024		2025	2026	2027	2028	2029
Distribusi penduduk yang seimbang secara spasial, ekologis dan sosial	Persentase Kampung Keluarga berkualitas Mandiri	56,5		56,9	57,3	57,7	58,1	58,5
	Kepadatan Penduduk	3.619						

2.5.Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan Administrasi Data Kependudukan

1. Arah Kebijakan

Mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta di kelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah di akses oleh pemangku kepentingan.

2. Strategi

- Pelayanan prima administrasi kependudukan;
- Tertib administrasi kependudukan;
- Integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber;
- Peningkatan pendayagunaan data dan informasi kependudukan

3. Target Penataan Administrasi Data Kependudukan

Penataan Administrasi Data Kependudukan adalah proses pengelolaan dan pembaruan data penduduk secara sistematis, akurat, dan terpadu. Tujuannya adalah untuk menyediakan data kependudukan yang valid sebagai dasar kebijakan pemerintah, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pemutakhiran rutin data diperlukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki identitas yang sah dan terintegrasi dalam sistem data nasional.

Tabel 2.5 Target Penataan Administrasi Data Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Tujuan/sasaran strategis	Indikator	Baseline	Sumber	Target				
		2024		2025	2026	2027	2028	2029
Memperluas cakupan administrasi kependudukan untuk mendukung kebijakan pembangunan	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (0-4 tahun)	99,84		99,88	99,93	99,97	99,99	99,99

Tujuan/sasaran strategis	Indikator	Baseline	Sumber	Target				
		2024		2025	2026	2027	2028	2029
n berbasis data	Cakupan (Persentase) penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	87,03%		87,59 %	88,21 %	88,83 %	89,52 %	90,13 %
	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Nikah	42,17%		44,31 %	46,73 %	49,07 %	52,16 %	55,52 %
	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk Meninggal	1.586		1.531	1.494	1.449	1.382	1.306

BAB III

RENCANA AKSI

3.1. Tata Kelola Pembangunan Kependudukan

Tata kelola pembangunan kependudukan mencakup serangkaian mekanisme, proses, dan inisiatif keberlanjutan yang komprehensif dan berusaha untuk mengoordinasikan, menyinergikan, serta mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan populasi dalam wilayah tertentu dengan cara yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kerangka tata kelola ini bertindak sebagai pedoman dasar bagi semua pemangku kepentingan terkait dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan penduduk. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pembangunan kependudukan yang terencana dan kohesif melalui upaya kolaboratif dari berbagai sektor yang saling terkait. Keberlanjutan tata kelola yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan di tingkat kabupaten dioperasikan oleh Tim Koordinasi PJPK Kota Salatiga yang berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Tanggung jawab tim ini meliputi koordinasi, sinergi, dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dengan cara yang efektif, terintegrasi, dan kohesif. Pelaksanaan tanggung jawab ini dilakukan dengan keterlibatan aktif dari beragam sektor dan pemangku kepentingan. Dalam penyusunan dan pelaksanaan PJPK, penting untuk membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK untuk Kota Salatiga dengan struktur dan tanggung jawab yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tim Pengarah Penyusunan PJPK Kota Salatiga Tahun 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Anggota

5.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

Tabel 3.2 Kelompok Kerja Penyusunan Pjpk Kota Salatiga Tahun 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Kesekretariatan
3.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Salatiga	Anggota
4.	Kepala Kementerian Agama	Anggota
5.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Pendidikan	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Sosial	Anggota
11.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
12.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
13.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
14.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan KIE	Anggota
15.	JF Perencana pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota

NO	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	JF Perencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Anggota
17.	JF Perencana pada Dinas Kesehatan	Anggota
18.	JF Perencana pada Dinas Pendidikan	Anggota
19.	JF Perencana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
20.	JF Perencana pada Dinas Sosial	Anggota
21.	JF Perencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
22.	JF Perencana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
23.	JF Perencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
24.	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
25.	Staf pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
26.	Staf Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan KIE pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Anggota

3.2. Rencana Aksi Tahun 2025 - 2029

Pembangunan kependudukan memerlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan terukur. Rencana aksi disajikan secara konkret yang dirancang untuk menjawab tantangan kependudukan secara komprehensif, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Rencana aksi ini disusun sebagai panduan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan kependudukan.

Rencana aksi dalam dokumen ini dirumuskan berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi kependudukan saat ini, dengan memperhatikan

aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk. Setiap kegiatan disusun untuk mencapai target-target spesifik yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas sebagai alat ukur keberhasilan. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci utama, di mana sinergi antarprogram dan lintas sektor akan terus diperkuat untuk memastikan dampak yang optimal.

Pelaksanaan rencana aksi ini mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, inklusivitas, dan berbasis bukti. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang robust akan diterapkan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana, sekaligus memungkinkan penyempurnaan strategi di tengah jalan apabila diperlukan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha akan terus didorong untuk menciptakan pembangunan kependudukan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Melalui rencana aksi ini, diharapkan dapat tercipta percepatan pembangunan kependudukan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dokumen ini juga menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola kependudukan yang lebih baik, dengan penduduk yang berkualitas sebagai modal utama pembangunan daerah dan nasional ke depan.

3.2.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Tabel 3.3 Rencana Aksi Pengendalian Kuantitas Penduduk

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Instansi Utama
1	Total Fertility Rate (TFR)	1,96	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.0025 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	DP3APPKB
2	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	5,8			2.14.02.2.01.0028 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
3	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	85	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam	2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Instansi Utama
				rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kegiatan Masyarakat Binaan	
					2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Instansi Utama
					Lapangan dan Pelayanan KB	
			2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
					2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Instansi Utama
					Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	
					2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Instansi Utama
					2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
					2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	

3.2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Tabel 3.4 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Penduduk

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	11,53	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DISDIK
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Pemberian layanan pendampingan bagi	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	
					Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
2	Angka Partisipasi Kasar					

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
	Pendidikan Tinggi (%)					
3	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	2.113	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	<i>Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis</i>	DPUPR
					<i>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi</i>	
					<i>Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis</i>	
			1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang	DPKP

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
			REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	DISBUDPAR
					Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
				Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	9,6	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DDK
5	Jumlah Kasus Kematian Bayi	11			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
6	Jumlah Kasus Kematian Ibu	1			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui pendekatan keluarga	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Operasional pelayanan puskesmas	
					Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	
					Pengelolaan Pelayanan kesehatan reproduksi	
					Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
			SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Bimbingan Teknis dan supervisi	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
				Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	
7	Tingkat Kemiskinan	4,23 - 2,54	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (untuk PPKS non PPM di rumah singgah dan di masyarakat)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	DINSOS
					Penyediaan Alat Bantu	
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68,01%	2.08.02 PROGRAM PENGARUS-UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	DP3APPKB
					2.08.02.2.01.0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.0007 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	1,91	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DINSOS
			2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	
			2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
10	Gini Ratio					

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
11	PDRB Per kapita	91,1- 226,11	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Keg Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Sub keg Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	DINDKOPUKM
					Sub Keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Keg Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	DISBUDPAR
					Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	
					Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
				Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
				Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
				Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		DISBUDPAR

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
				Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota		
				Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			DISDAG
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPSTP
					Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.84-3.58	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	DISPERINNAKER

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					berdasarkan Klaster Kompetensi	
13	Persentase Pekerja Informal	36		2.07.03.2.02 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.07.03.2.02.0001 Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja	
				2.07.04.1.03 Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.0003 Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	
				2.07.04.2.04 Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.0001 Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
			2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	2.07.05.2.01.0003 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
				Kota	Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	3.31.03.2.01 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01.0003 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	
			3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.2.01 Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.31.04.2.01.0001 Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN	3.31.02.2.01 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0004 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
			PEMBANGUNAN INDUSTRI		Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	
					3.31.02.2.01.0005 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
14	Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi*					

3.2.3. Pembangunan Keluarga

Tabel 3.5 Rencana Aksi Pembangunan Keluarga

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
1	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	72,3	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					2.08.03.2.03.0006 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
					2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					2.14.04.2.02.0008 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	
2	Indeks Perlindungan Anak	73,2	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	DP3APPKB
3	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	94,4				
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Penyediaan Permakanan	DINSOS

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
				Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
					Penyediaan Sandang	
					Penyediaan Alat Bantu	
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Pemberian Layanan Rujukan	
			PROGRAM PERLINDUNGAN	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
			DAN JAMINAN SOSIAL			
					Rujukan Anak-Anak Terlantar	
					Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
			2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3APPKB
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					2.08.06.2.02.0009 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang	2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah	DP3APPKB

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
				Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	
					2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
					2.08.07.2.03.0011 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
4	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	97,5	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	DPKP
					Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
					Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
					Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
					Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
					Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	
			1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
					Sub Kegiatan Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
			1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
					Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
					Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
					Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
			1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
					Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
					Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	36,9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>	DPUPR
					<i>Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	
					<i>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					<i>Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</i>	
					<i>Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman</i>	
					<i>Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan</i>	
					<i>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	
					<i>Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat</i>	
					<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	<i>Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan</i>	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
			PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
					<i>Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</i>	
					<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</i>	
					<i>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan</i>	
6	Indeks Lansia Berdaya	58	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui pendekatan keluarga	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	
					Penyediaan Sandang	
					Penyediaan Alat Bantu	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Pemberian Layanan Kedaruratan	
7	Cakupan Kepesertaan	97,3	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
	Jaminan Kesehatan Nasional (%)		UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.07.05.2.01.0003 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	

3.2.4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Tabel 3.6 Rencana Aksi Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
1	Persentase Kampung Keluarga berkualitas Mandiri	58,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
				Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
					2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					2.14.04.2.02.0008 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	
2	Rate Nett Recent Migrasi	4,88	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	DISPERINNAKER
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
			PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	
			3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					2. Penyuluhan transmigrasi	

3.2.5. Integrasi Data Kependudukan

Tabel 3.7 Rencana Aksi Integrasi Data Kependudukan

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
1	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	99,99%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DINDUKCAPIL
2	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	90,13%		Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
3	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	55,52%		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
4	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	1.306	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	

No	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	OPD
					Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
					Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	
					Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Monitoring

Monitoring merupakan komponen krusial dalam implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga 2025-2029. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas penduduk. Melalui proses monitoring yang dilakukan secara berkala, perkembangan capaian indikator, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta mengambil langkah korektif secara tepat waktu. Selain itu, monitoring juga berfungsi sebagai alat untuk menilai tentang pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Monitoring berfungsi untuk menilai seberapa efektif program, seberapa efektif penggunaan sumber daya, dan seberapa relevan kebijakan dengan dinamika kependudukan di lapangan, penting untuk menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari hasil monitoring. Kota Salatiga dapat memanfaatkan mekanisme ini untuk memastikan keterpaduan antar sektor, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, dan menyesuaikan strategi intervensi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka juga dapat mencapai target pembangunan kependudukan secara optimal.

4.2. Evaluasi

Evaluasi menyediakan analisis mendalam tentang efektivitas program, dampak yang dihasilkan, dan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Seluruh proses ini melibatkan kolaborasi antar instansi terkait dengan pembagian peran yang jelas, mulai dari pengumpulan data, analisis capaian, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan. Evaluasi berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan strategis tentang perbaikan kebijakan dan program pembangunan kependudukan. Dengan menggunakan hasil evaluasi yang menyeluruh, pemerintah Kota Salatiga dapat mengetahui sejauh mana intervensi yang dilakukan mencapai tujuan yang diinginkan, menemukan faktor keberhasilan dan hambatan pelaksanaan, dan mengukur dampak nyata

dari peningkatan kualitas penduduk. Selain itu, proses ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, dan membantu memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mencapai pembangunan kependudukan yang berhasil dan berkelanjutan.

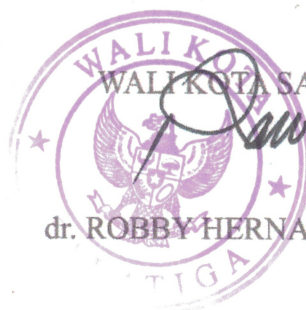
4.3. Pelaporan

Pelaporan merupakan Informasi tentang kemajuan dan hasil PJPk disampaikan kepada para pemangku kepentingan secara terbuka dan akuntabel melalui proses pelaporan. Pelaporan disusun secara berkala dan berjenjang sesuai dengan alur tata kelola yang disepakati. Seluruh tahapan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPk) dapat dipantau dan dinilai secara terbuka melalui pelaporan. Pemerintah Kota Salatiga dapat memberikan laporan yang sistematis dan berbasis data tentang pencapaian indikator, hambatan, dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan program. Proses ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi dasar penting untuk kebijakan berbasis bukti, yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tabel 4.1 Instrumen Monitoring dan Evaluasi

No	Rencana		Realisasi				Instansi Yang Terlibat
	Kegiatan	Target Tahunan	Waktu Pelaksanaan	Capaian	Kendala / Hambatan	Evaluasi & Tindak Lanjut	
Pengendalian Kuantitas Penduduk							
Peningkatan Kualitas Penduduk							

No	Rencana		Realisasi				Instansi Yang Terlibat
	Kegiatan	Target Tahunan	Waktu Pelaksanaan	Capaian	Kendala / Hambatan	Evaluasi & Tindak Lanjut	
Pembangunan Keluarga							
Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk							
Integrasi Data Kependudukan							



 dr. ROBBY HERNAWAN, Sp. OG





PEMERINTAH KOTA SALATIGA

PETA JALAN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

**KOTA SALATIGA
TAHUN 2025 - 2029**



dp3appkb.salatiga



dp3appkb.salatiga.go.id



DP3APPKB Kota Salatiga